

**PENGARUH SANKSI PAJAK, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT
PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
USAHAWAN DI KPP PRATAMA KOTA PRABUMULIH**

Bayu Dharmaraga Alkahfi¹, Meirani Betriana², Chairani Adelina³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prabumulih

email: bayudharma17@unpra.ac.id

Abstract

Tax is a constantly evolving phenomenon in society, serving as a crucial tool for governments to achieve national and state independence by financing development projects that benefit the common interests of the people. This study aimed to investigate the impact of Tax Sanctions, Motivation to Pay Taxes, and Education Levels on the compliance of individual taxpayers and entrepreneurs at KPP Primary Prabumulih City. The variables considered were Tax Sanctions (X_1), Motivation to Pay Taxes (X_2), Education Level (X_3), and Taxpayer Compliance (Y). The sample size consisted of 99 taxpayers from KPP Pratama Prabumulih city. This research adopted a quantitative approach, which aimed to provide an empirical explanation of the phenomenon through statistical data, identifying characteristics and patterns of relationships between the variables. The model's summary revealed that the calculated results yielded an R Square value of 0.836, indicating a high degree of explanation. Consequently, it can be inferred that the variables tax sanctions, motivation to pay taxes, and education level collectively contributed to 16.4% of the influence on the dependent variable (taxpayer compliance). In other words, the independent variables (tax sanctions, motivation to pay taxes, and education level) could account for 83.6% of the dependent variable (taxpayer compliance). However, it should be noted that the remaining 16.4% is influenced or explained by other variables not examined in this study, such as taxpayers' understanding, perceptions, and so forth.

Keywords: *Tax Sanctions, Motivation to Pay Taxes and Education Level and Taxpayer Compliance.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu income terbesar pendapatan potensial pada suatu negara. Penerimaan sektor perpajakan menjadi salah satu pondasi pembiayaan negara. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas lain

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mendanai kegiatan pemerintah dan membiayai program dan layanan publik. Pajak dikumpulkan dari pendapatan, kekayaan, atau transaksi tertentu dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya (Hanif, 2020).

Kepatuhan pajak merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan pajak dinilai dari perspektif formal dan substantif kepatuhan pajak. Wajib Pajak dianggap patuh apabila mereka mampu dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan perpajakan dapat tercapai apabila kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tercapai. Otoritas pajak dapat mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Misalnya melalui kegiatan yang ditujukan kepada wajib pajak, nasehat. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. (Mardiasmo, 2019).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) dipatuhi/diikuti. Sanksi pajak merupakan alat preventif untuk memastikan wajib pajak tidak melanggar standar perpajakan. Wajib pajak orang pribadi diharapkan tekun dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2019).

Menurut Zain, (2018), Motivasi membayar pajak adalah dorongan atau alasan yang mendorong individu atau entitas untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Ini bisa mencakup pemenuhan kewajiban warga negara, kontribusi untuk pembangunan dan kemajuan, menjaga stabilitas dan keamanan, mendukung layanan publik, serta menghindari konsekuensi hukum. Motivasi ini dapat muncul baik dari dalam maupun luar diri seseorang motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu sedangkan motivasi kebutuhan (*need*), keinginan (*wish*), dorongan (*desire*) atau *Impuls*.

Pendidikan adalah proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya untuk mengembangkan potensi individu dan persiapan dalam kehidupan (Mulyasa, 2021). Tujuan dari pendidikan adalah untuk membekali wajib pajak dengan teori-teori perpajakan dan kegiatan perpajakan sehingga pelaksanaan sistem perpajakan dapat berjalan lancar. Wajib Pajak dengan pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan kewajiban perpajakannya (Zain, 2018)

Undang-undang no 28 tahun 2007 pasal 1, menyatakan wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak, seharusnya dapat mengelola usaha individualnya dengan lebih baik dibandingkan usaha organisasi. Dengan struktur yang ada, orang pribadi dapat mengatur seluruh pengeluaran dalam

kegiatan usahanya agar memperoleh keuntungan yang diinginkan termasuk dalam mengatur kewajiban perpajakannya.

Tabel 1

Perbandingan Data Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Yang Terdaftar Di KPP Kota Prabumulih Dan Jumlah Wajib Pajak Usahawan Yang Aktif Melaporkan Perpajakannya Tahun 2019-2022.

Tahun	WP OP Usahawan yang terdaftar	WP OP usahawan yang aktif melaporkan perpajakannya	WP OP Usahawan yang tidak patuh melaporkan perpajakannya
2019	2.303	1.523	780
2020	3.399	1.875	1.524
2021	4.330	2.349	1.981
2022	7.781	5.894	1.887

Sumber : KPP Pratama Kota Prabumulih, 2022

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa walaupun jumlah wajib pajak badan swasta yang terdaftar di KPP Pratama Kota Prabumulih tergolong tinggi, namun tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang aktif melapor. Dalam situasi seperti ini diperkirakan jumlah tunggakan pajak yang terakumulasi di KPP Pratama Prabumulih tidak selalu mencapai jumlah pembayaran sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan rendahnya penerimaan pemerintah di bidang pajak. Dari Tabel 1 juga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak sektor pajak penghasilan badan swasta selalu menunjukkan fluktuasi yang naik turun, sehingga mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak negara. Berikut perbandingan informasi wajib pajak badan terdaftar dengan jumlah wajib pajak badan yang aktif melaporkan pajaknya.

Fenomena yang relevan di lapangan menjelaskan bahwa tidak semua wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku dan membayar pajak sesuai dengan itu. Motivasi wajib pajak bermacam-macam, mulai dari enggan melaporkan kekayaannya hingga tidak mau ke kantor pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Pajak perusahaan tidak mudah. Jika terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, jika nilainya terlalu rendah, pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena kekurangan dana. Secara sederhana, tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dari persentase wajib pajak orang pribadi yang menerima dan melaporkan Pajak Penghasilan (SPT) Tahunan.

Dalam kasus ini, KPP Pratama Kota Prabumulih, salah satu dinas pajak di Kantor Wilayah Dinas Perpajakan Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, berupaya menagih uang dengan mengirimkan surat teguran. Selain itu, KPP Pratama Kota Prabumulih juga menerbitkan surat perintah wajib, surat perintah sita dan surat perintah lelang.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, termasuk Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak adalah juga orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan telah memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemungut pajak tertentu. Menurut self assesment, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri, menghitung sendiri pembayarannya dan melaporkan pembayaran pajaknya.

2.2. Sanksi Pajak

Sanksi ataupun denda yang diberikan oleh pemerintah bisa saja dengan mudah untuk dihindari karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban untuk membayar pajak dan kurang tegasnya sanksi yang dibuat oleh pemerintah. Sanksi pajak diukur dengan indikator yang digunakan oleh Tambunan (2020) yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.3. Motivasi Membayar Pajak

Menurut Zain (2018) motivasi membayar pajak adalah dorongan atau alasan yang mendorong individu atau entitas untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Motivasinya bisa berasal dari tanggung jawab warga negara, kontribusi untuk pembangunan dan layanan publik, menjaga stabilitas dan keamanan, serta menghindari konsekuensi hukum. Motivasi ini dapat muncul di dalam atau di luar individu. Motivasi wajib pajak yang berasal dari luar untuk membayar pajak adalah motivasi dari fiskus, lingkungan kerja, teman atau kerabat yang mendorongnya untuk membayar pajak. Menurut Rahman (2022), indikator motivasi yang diidentifikasi wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Motivasi Intrinsik
 - a. Integritas Wajib Pajak, yang mengacu pada *self assessment system* yang membutuhkan tingkat integritas yang tinggi dari setiap Wajib Pajak untuk mencapai tujuan perpajakan.
 - b. Kesadaran Wajib Pajak: Tingkat kesadaran mempengaruhi tingkat kewajiban pajak seseorang. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula jumlah kewajiban perpajakannya begitu pula sebaliknya.

- c. Kemauan Membayar Pajak, kepatuhan muncul ketika kesadaran membayar pajak diikuti dengan keinginan atau keinginan yang besar dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Motivasi Ekstrinsik
 - a. Sistem perpajakan perlu disosialisasikan, agar masyarakat mengetahui dan memahami kegunaan pajak bagi pembangunan negara.
 - b. Lingkungan kerja, teman atau kerabat, interaksi sosial antar individu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap benar oleh kelompok (mayoritas). Ketika individu hidup dalam kelompok pembayar pajak, mereka juga didorong untuk melakukan pajak dan kejahatan. dan sebaliknya.
 - c. Motivasi adalah latar belakang perilaku individu. Ketika motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tinggi, pembangunan di Indonesia berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Namun, ketika motivasi masyarakat rendah, pembangunan melambat.

2.3. Tingkat Pendidikan

Mulyasa (2021) berpendapat Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus menerus tak terputus dari generasi ke generasi dimana pun di dunia ini. Upaya manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan dalam latar sosial kebudayaan setiap masyarakat tertentu untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang tepat tentang bidang tugasnya.

Pemahaman dan kesadaran merupakan aspek yang harus disampaikan kepada masyarakat luas agar kepatuhan kemudian dapat dilaksanakan. Sumber daya yang paling efektif adalah sekolah dan perguruan tinggi. Dunia pendidikan merupakan tempat yang tepat untuk memberikan informasi perpajakan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak sejak dini. Wajib pajak yang terdidik dan paham perpajakan lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan mereka yang kurang terinformasi. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Tingkat Pendidikan seorang wajib pajak adalah:

1. Pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh wajib pajak.
2. Pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya (Rahman, 2022). Kewajiban perpajakan orang pribadi adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak orang pribadi, baik yang bekerja

sebagai pegawai maupun wiraswasta, memenuhi segala kewajiban dan hak perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan terhadap perpajakan bersifat formal, yaitu. H. pemenuhan hak dan kewajiban, tata cara dan sanksi Wajib Pajak di bidang perpajakan. Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam *self assessment sistem* sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
3. Menghitung pajak oleh wajib pajak
4. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
5. Pelaporan dilakukan wajib pajak.

3. METODE

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik, dan pola hubungan antar variabel. Alasan digunakan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, dalam penelitian ini digunakan suatu hipotesis yang berkaitan dengan analisis yang diteliti, disertai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, dokumentasi dan wawancara.

3.2. Populasi

Penulis memilih populasi dalam penelitian ini yaitu Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak usahawan UMKM yang ada di Kantor KPPP Kota Prabumulih, populasi yang berjumlah 7.781 orang terdiri dari usahawan UMKM yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah usaha toko kue, usaha pembuatan air minum, penjual kosmetik, penjual sembako, dan penjual buku. Karakteristik khusus yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah pelaku usahawan UMKM.

3.3. Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling, teknik random sampling adalah pengambilan sampling secara random atau tanpa pandang bulu. Berdasarkan rumus Slovin, maka jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 98,7 dibulatkan jadi 99.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Istijanto (2015:69), dalam pengumpulan data dilakukan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Metode Angket atau Kuesioner
2. Metode Observasi

3. Metode Dokumentasi atau Studi Pustaka

3.5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa skor atau poin yang diperoleh dari jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Agar data yang telah dikumpul dapat bermanfaat, maka data harus diolah sesuai dengan prosedur penelitian dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk menginterpretasikan, dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Dalam penghitungan scoring digunakan skala Likert yang pengukurannya sebagai berikut :

Tabel 2
Skala Pengukuran Variabel

SKOR	KETERANGAN
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

Sumber : Sugiono, (2017:87)

3.6. Teknik Analisis Data

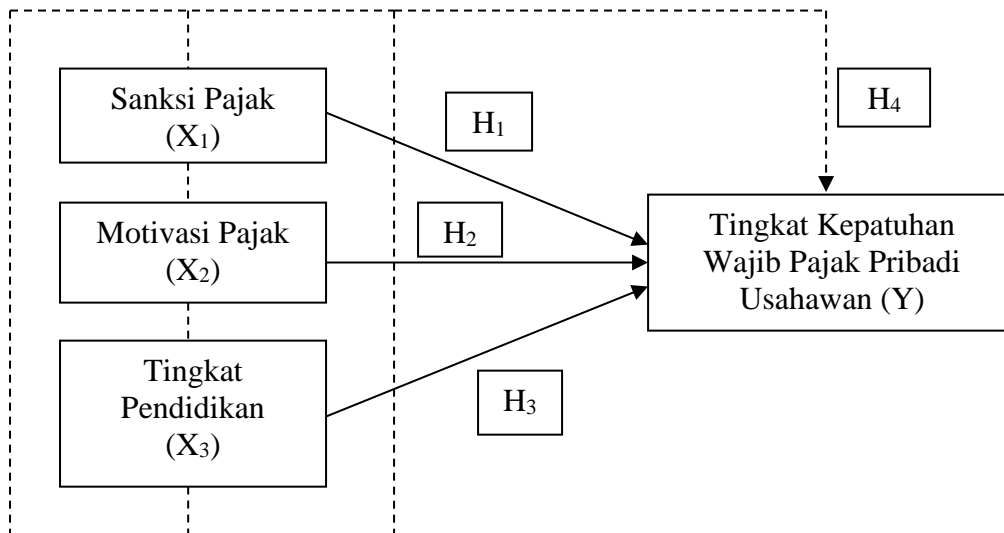
Sebelum melakukan analisis lebih mendalam, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis terdiri dari:

1. Uji Instrumen Penelitian
 - a. Uji Validitas
 - b. Uji Reliabilitas

2. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas
 - b. Uji Heteroskedastisitas
 - c. Uji Korelasi
 - d. Uji Multikolinearitas
3. Analisis Regresi Linear Berganda
4. Teknik Pengujian Hipotesis

- Uji Signifikan Parsial (Uji t)
- Uji Signifikan Simultan (Uji f)
- Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

3.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y
 - - - - - → Pengaruh interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y

3.8. Hipotesis

- H_1 : Diduga sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Prabumulih.
- H_2 : Diduga motivasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Prabumulih.
- H_3 : Diduga pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Prabumulih.

H₄ : Diduga sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Prabumulih.

4. HASIL DAN DISKUSI

4.1. Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X1)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SP1	37.61	21.547	.505	.847
SP2	37.48	22.191	.473	.849
SP3	37.44	21.474	.549	.843
SP4	37.43	21.432	.510	.846
SP5	37.61	20.915	.580	.841
SP6	37.68	19.527	.659	.833
SP7	37.53	19.680	.719	.828
SP8	37.38	21.280	.519	.846
SP9	37.23	22.201	.419	.853
SP10	37.61	18.690	.670	.833

Sumber : Data Primer Penelitian Diolah, 2023.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Membayar Pajak (X2)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
M1	37.31	17.952	.376	.740
M2	37.12	18.842	.358	.742
M3	37.25	18.109	.448	.730
M4	37.04	17.958	.432	.732
M5	37.23	17.976	.410	.735
M6	37.35	17.251	.472	.726
M7	37.27	17.180	.522	.719
M8	37.01	18.459	.356	.742
M9	36.92	18.708	.341	.744
M10	37.39	16.527	.453	.730

Sumber : Data Primer Penelitian Diolah, 2023.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pendidikan (X3)
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TP1	38.15	18.048	.380	.756
TP2	37.97	17.764	.492	.741
TP3	37.83	18.736	.409	.752
TP4	37.66	19.003	.360	.757
TP5	38.08	17.749	.368	.759
TP6	38.03	17.764	.417	.751
TP7	37.92	17.381	.550	.733
TP8	37.75	17.721	.509	.739
TP9	37.66	18.289	.428	.749
TP10	38.05	16.824	.456	.747

Sumber: Data primer diolah, 2023

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KW1	39.36	14.887	.677	.700
KW2	39.32	15.241	.619	.710
KW3	38.86	17.163	.486	.734
KW4	38.78	18.379	.335	.752
KW5	39.47	15.701	.349	.763
KW6	39.03	16.744	.461	.736
KW7	39.03	17.397	.380	.746
KW8	38.70	17.846	.421	.743
KW9	38.70	18.622	.333	.753
KW10	39.20	16.489	.327	.760

Sumber : Data Primer Penelitian Diolah, 2023

Hasil uji validitas pada tabel-tabel diatas untuk variabel X₁, X₂, X₃ dan Y untuk tiap butir kuisisioner memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,317. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap butir pernyataan dikuisisioner valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 7
Hasil Pengujian Reliabilitas

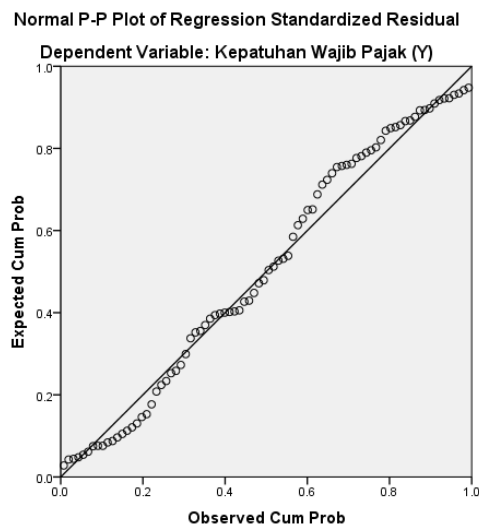
Variabel	Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak (X_1)	0,856	Reliabel
Motivasi Membayar Pajak (X_2)	0,754	Reliabel
Tingkat Pendidikan (X_3)	0,768	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,760	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah 2023

Hasil uji reliabilitas seperti output SPSS tersebut pada tabel di atas, menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel.

4.2. Uji Asumsi Klasik

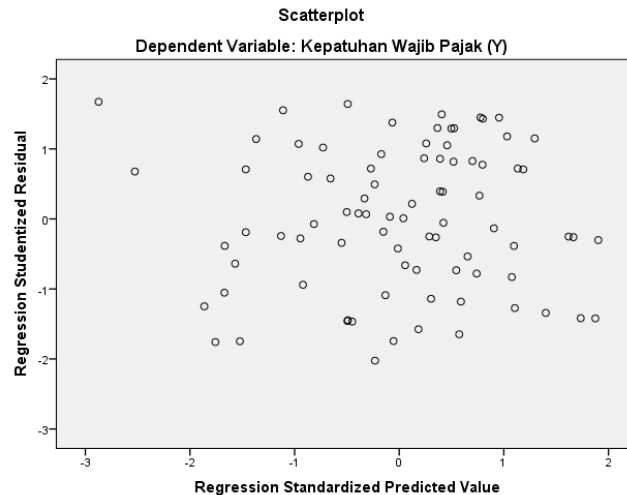
Uji Normalitas



Gambar 2. P-Plot Uji Normalitas

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh dari garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi tersebut sudah terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa titik sampel menyebar diatas dan dibawah angka nol, serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Korelasi

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, diperoleh nilai korelasi sanksi pajak (X_1), motivasi (X_2), tingkat pendidikan (X_3) terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y), sebagai berikut :

- Keeratan hubungan dapat diketahui dengan nilai korelasi variabel sanksi pajak (X_1) sebesar 0,730, karena berada di range 0,600-0,799, maka disimpulkan bahwa hubungan variabel (X_1) sanksi pajak adalah kuat.
- Keeratan hubungan dapat diketahui dengan nilai korelasi variabel motivasi (X_2) sebesar 0,826, karena berada di range 0,800-1,000 maka disimpulkan bahwa hubungan variabel (X_2) motivasi adalah sangat kuat.
- Keeratan hubungan dapat diketahui dengan nilai korelasi variabel tingkat pendidikan (X_3) sebesar 0,475, karena berada di range 0,400 – 0,599 maka disimpulkan bahwa hubungan variabel (X_3) tingkat pendidikan adalah sedang.

Lebih lengkapnya pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Hasil Uji Korelasi
Correlations

			Sanksi Pajak (X1)	Motivasi (X2)	Tingkat Pendidikan (X3)	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Sanksi Pajak (X1)	Correlation Coefficient	1.000	.084	.047	.061
		Sig. (2-tailed)	.	.571	.584	.730
		N	100	100	100	100
	Motivas (X2)	Correlation Coefficient	.084	1.000	.611**	.072
		Sig. (2-tailed)	.571	.	.000	.826
		N	84	84	84	84
	Tingkat Pendidikan (X3)	Correlation Coefficient	.047	.611**	1.000	-.037
		Sig. (2-tailed)	.584	.000	.	.475
		N	84	84	84	84
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.061	.072	-.037	1.000
		Sig. (2-tailed)	.730	.826	.475	.
		N	84	84	84	84

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Multikolonieritas

Tabel 9
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	46.711	7.269		6.426	.000		
Sanksi Pajak (X1)	.520	.106	.101	2.895	.003	.955	1.048
Mtivasi Membayar Pajak (X2)	.428	.126	-.113	2.014	.001	.952	1.502
Tingkat Pendidikan (X3)	.730	.102	-.068	3.097	.005	.732	1.366

Berdasarkan tabel diatas nilai tolerance semua variabel bebas (sanksi pajak 0,955, motivasi: 0,952, tingkat pendidikan: 0,732) lebih besar dari nilai batas yang ditentukan yaitu sebesar 0,004. Untuk nilai VIF terlihat bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF yang kurang dari 10 (sanksi 1,048, motivasi 1,502, dan tingkat pendidikan: 1,366). Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel 9 diatas, Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 46.711 + 0,520.X_1 + 0,428.X_2 + 0,730.X_3$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien regresi konstanta = 46.711 dengan tanda positif yang merupakan nilai konstanta dimana diartikan bahwa jika variabel-variabel independen yaitu sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan diasumsikan dengan nilai konstan, maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 46.711.
2. Nilai koefisien regresi X_1 (β_1) sebesar 0,520 artinya untuk setiap kenaikan 1 skor variabel sanksi pajak (X_1) akan menaikkan skor kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,520.
3. Nilai koefisien regresi X_2 (β_2) sebesar 0,428 artinya untuk setiap kenaikan 1 skor variabel motivasi membayar pajak (X_2) akan menaikkan skor kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,428.
4. Nilai koefisien regresi X_3 (β_3) sebesar 0,730 artinya untuk setiap kenaikan 1 skor variabel tingkat pendidikan (X_3) akan menaikkan skor kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,730.

4.4. Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui pengaruh untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel X_1 terhadap Y adalah nilai t_{hitung} 2.895 > nilai t_{tabel} 1.990. berdasarkan analisis pengaruh variabel independen (sanksi pajak X_1) terhadap variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak) berpengaruh positif, dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dengan signifikansi $0,003 < 0,05$ maka H_1 diterima berarti terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .
2. Pengaruh variabel X_2 terhadap Y adalah nilai t_{hitung} 2.014 > nilai t_{tabel} 1.990. berdasarkan analisis pengaruh variabel independen (motivasi membayar pajak, X_2) terhadap variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak) berpengaruh positif, dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dengan signifikansi $0,001 < 0,05$ maka H_2 diterima berarti terdapat pengaruh antara motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh variabel X_3 terhadap Y adalah nilai t_{hitung} 3.097 > nilai t_{tabel} 1.990. berdasarkan analisis pengaruh variabel independen (tingkat pendidikan, X_3) terhadap variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak) berpengaruh positif, dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, dengan signifikansi $0,005 < 0,05$ maka H_3 diterima berarti terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi Secara Bersama-sama
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	45.347	3	15.116	5.278	.004 ^b
	Residual	1678.225	80	20.978		
	Total	1723.571	83			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai $F_{hitung} = 5,278 > F_{tabel} = 2.750$ dengan signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ Dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ menunjukkan bahwa secara bersama-sama sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti hipotesis H_4 diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.742 ^a	.836	.696	4.58015

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan (X3), Motivasi Membayar Pajak (X2), Sanksi Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan *output model summary* didapatkan tabel determinasi di atas yang memberikan R Square sebesar 0,836. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan secara simultan persentase sumbangan pengaruh variabel independent mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent (kepatuhan wajib pajak), sebesar 16,4%. Atau variabel independent (sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan) mampu menjelaskan sebesar 83,6% variabel dependent (kepatuhan wajib pajak), sedangkan sisanya 16,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya pemahaman, persepsi wajib pajak dll.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dilihat dari hasil uji untuk pengaruh variabel sanksi pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (nilai t hitung 2.895 > nilai t tabel 1.990), dengan signifikansi $0,003 < 0,05$ maka H_1 diterima berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Dilihat dari hasil uji untuk pengaruh variabel motivasi membayar pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (nilai t hitung $2.014 >$ nilai t tabel 1.990), dengan signifikansi $0,001 < 0,05$ maka H_2 diterima berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Dilihat dari hasil uji untuk pengaruh variabel tingkat pendidikan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ((nilai t hitung $3.097 >$ nilai t tabel 1.990), dengan signifikansi $0,005 < 0,05$ maka H_2 diterima berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai $F_{hitung} = 1,575 < F_{tabel} = 2.750$ dengan signifikansi sebesar $0,531 > 0,05$ Dengan nilai signifikansi dibawah $0,05$ dan $F_{hitung} < F_{tabel}$ menunjukkan bahwa secara bersama-sama sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti hipotesis diterima.
5. Berdasarkan hasil uji determinasi memberikan R Square sebesar $0,836$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan secara simultan persentase sumbangan pengaruh variabel independent mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent (kepatuhan wajib pajak), sebesar $16,4\%$. Atau variabel independent (sanksi pajak, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan) mampu menjelaskan sebesar $83,6\%$ variabel dependent (kepatuhan wajib pajak), sedangkan sisanya $16,4\%$ dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya pemahaman, persepsi wajib pajak dll.

6. REFERENSI

- Ghozali. 2020. "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hanif, Muhammad. 2020. "*Pengantar Pajak: Teori dan Praktek*". Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2019. "*Perpajakan Edisi 2019*". Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyasa, Enco. (2021). "*Manajemen Pendidikan Karakter*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Abdul. 2022. "*Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*". Bandung: Nuansa Cendekia.

- Sugiono, 2017. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, Uma, 2017. *“Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 6”*. Jakarta : Salemba Empat
- Tambunan, Benny Y. 2020. *“Perpajakan Indonesia: Konsep dan Implementasi”* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. 2021. *“Metodologi Penelitian Untuk Skripsi danTesis Bisnis”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1, TENTANG Wajib Pajak Orang Pribadi
_____ KUP Pasal 1 ayat (1), Tentang Pajak Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000
_____ Nomor 16 tahun 2009 tentang Perpajakan.
_____ Nomor 16 Pasal 1 tahun 2009 tentang Wajib Pajak.
_____ Nomor 14 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zain, Mohammad. 2018. *“Manajemen Perpajakan”*. Jakarta: Salemba Empat